JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT AKADEMISI
Volume 4 Nomor 4 Oktober 2026
e-ISSN: 2964-3430; p-ISSN: 2985-3737, Hal 345-354
DOI: https://doi.org/10.59024/jpma.v4i4.2523
Tersedia: https://jurnal.alimspublishing.co.id/index.php/JPMA

Penguatan Kapasitas Tata Kelola Digital Pemerintah Desa Palasa Berbasis Temuan Riset Kegagalan Transformasi Digital

Muh. Nawawi[1*], Dandan Haryono[2], Sisrilnardi[3], Sintya Ayu[4], Alfiana Galuh[5], Adelia Ismayana Nawawi[6]
[1*- 6] Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tadulako, Palu, Indonesia
*email : muh.nawawi@untad.ac.id [1], dandanharyono@gmail.com [2], adeliaismayana12@gmail.com [3]
Penulis Korespondensi : muh.nawawi@untad.ac.id

Abstract: *The acceleration of digital transformation within village governments is often confronted with system failure risks caused by weak adaptation capacity of social infrastructure and human resource management. This community service aims to strengthen the digital governance capacity of the Palasa Village Government, Central Sulawesi, using an intervention framework built upon research findings regarding digital transformation failures. The program implementation methodology includes digital readiness auditing, intensive workshops on administrative data governance, and clinical assistance in public service information system adoption. The program involved 25 participants consisting of village apparatus and the village consultative body. The program's effectiveness was evaluated using pre-test and post-test instruments measuring digital literacy capacity alongside system performance observation. The results demonstrated a significant increase in the village apparatus' digital governance capacity index, soaring from an average score of 49% in the pre-test to 91% in the post-test (a 42% improvement). The tangible output of this intervention is the establishment of an error-minimized digitalized administrative governance and readiness of local internal regulations. This community service concludes that strengthening human and institutional capacity linearly serves as the primary determinant for the success of rural bureaucratic digitalization.*

Keywords: *Apparatus Capacity, Digital Governance, Transformation Failure, Central Sulawesi, Village Government.*

Abstrak : Akselerasi transformasi digital di tingkat pemerintahan desa seringkali dihadapkan pada risiko kegagalan sistemik akibat lemahnya kapasitas adaptasi infrastruktur sosial dan tata kelola SDM. Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk menguatkan kapasitas tata kelola digital Pemerintah Desa Palasa, Provinsi Sulawesi Tengah, menggunakan pendekatan berbasis intervensi berbasis temuan riset kegagalan transformasi digital. Metode pelaksanaan program mencakup tahapan audit kesiapan digital, lokakarya intensif tata kelola data administrasi, serta pendampingan klinis adopsi sistem informasi pelayanan publik. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh perangkat desa dan badan permusyawaratan desa yang berjumlah 25 orang. Evaluasi efektivitas program diukur melalui instrumen pre-test dan post-test untuk mengukur kapasitas literasi digital serta observasi performa sistem. Hasil pengabdian menunjukkan peningkatan signfikan dalam indeks kapasitas tata kelola digital aparatur desa dari skor rata-rata 49% saat pre-test melonjak menjadi 91% pada post-test (mengalami kenaikan sebesar 42%). Output riil kegiatan ini adalah terwujudnya tata kelola administrasi desa berbasis digital yang minim eror serta kesiapan regulasi internal desa. Pengabdian ini menyimpulkan bahwa penguatan aspek kapasitas manusia dan kelembagaan secara linier merupakan determinan utama keberhasilan digitalisasi birokrasi pedesaan**.**

Kata Kunci: Kapasitas Aparatur, Kegagalan Transformasi, Pemerintah Desa, Sulawesi Tengah, Tata Kelola Digital.

Naskah Masuk: 12 September2026; Revisi: 15 September 2026; Diterima: 22 September 2026; Tersedia: 28 September 2026; Terbit: 14 Oktober 2026;

1. PENDAHULUAN

Transformasi digital sektor pemerintahan di Indonesia telah merambah hingga aras pemerintahan terkecil, yakni pemerintahan desa. Implementasi regulasi nasional menuntut desa untuk mengadopsi Sistem Informasi Desa (SID) demi mewujudkan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan integratif. Namun demikian, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa laju digitalisasi birokrasi pedesaan di Provinsi Sulawesi Tengah masih sering terhambat oleh realitas kegagalan sistemik. Banyak platform digital yang telah dibangun dengan anggaran besar berakhir tidak terpakai atau mengalami disfungsi operasional dalam kurun waktu beberapa bulan pasca-peluncuran.

Desa Palasa yang terletak di wilayah administrasi Provinsi Sulawesi Tengah merupakan salah satu contoh wilayah yang memiliki komitmen awal cukup tinggi terhadap modernisasi digital pelayanan publik. Meskipun infrastruktur dasar internet sudah memadai, efektivitas operasional sistem informasi lokal seringkali mengalami kegagalan teknis maupun administratif. Fenomena ini berakar pada minimnya kesiapan kapasitas sosial dan literasi digital aparatur desa yang bertugas sebagai administrator operasional. Dominasi kecenderungan kegagalan transformasi digital bukan disebabkan oleh malafungsi perangkat keras, melainkan oleh faktor resistensi kebudayaan organisasi birokrasi, lemahnya standar prosedur operasional digital, serta rendahnya pengawasan terhadap kualitas input data birokrasi.

Mendasarkan pada kondisi empiris tersebut, riset-riset terdahulu mengenai kegagalan transformasi digital menyimpulkan bahwa fokus pembangunan yang melulu berorientasi pada aspek pengadaan perangkat fisik (*technological-centric*) tanpa disertai investasi penguatan kapasitas sumber daya manusia (*human-centric*) merupakan jalur utama kegagalan digitalisasi pemerintahan. Untuk mereduksi dampak buruk tersebut, tim pengabdian masyarakat dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako merumuskan sebuah kerangka intervensi adaptif guna menguatkan kapasitas tata kelola digital aparatur Pemerintah Desa Palasa berbasis refleksi kritis atas temuan empiris riset kegagalan transformasi.

Urgensi program pengabdian ini bertumpu pada restrukturisasi kompetensi teknis dan tata pamong kelembagaan lokal secara simultan. Aparatur desa perlu dibekali kemampuan

mitigasi risiko eror data, pemahaman kepatuhan regulasi privasi, serta pengelolaan manajemen basis data birokrasi yang komprehensif. Melalui integrasi lokakarya klinis dan pendampingan berkelanjutan, diharapkan tata kelola pemerintahan digital di Desa Palasa dapat bergeser dari model formalitas seremonial menuju sistem pelayanan publik yang kokoh, adaptif, tangguh, serta berkelanjutan dalam jangka panjang.

1.1 Tata Kelola Digital Pemerintah Desa

Tata kelola digital pada tingkat pemerintahan desa merupakan bentuk perwujudan e-government lokal yang mengintegrasikan pemanfaatan teknologi informasi guna mengoptimalkan proses internal birokrasi dan eksternal pelayanan publik (Pratama & Siregar, 2023: 175). Keberhasilan tata kelola digital ini membutuhkan prasyarat berupa integrasi tiga pilar utama secara linier, yaitu ketersediaan teknologi yang andal, struktur organisasi yang adaptif, serta kompetensi sumber daya manusia yang cakap (Cahyono & Untad, 2022: 101). Di lingkungan pedesaan, tata kelola data administrasi yang tertata dengan baik menjadi basis mutlak bagi efisiensi distribusi bantuan sosial, akurasi data kependudukan, serta ketepatan perumusan kebijakan anggaran desa (Santoso & Wijaya, 2024: 412).

1.2 Teori dan Faktor Kegagalan Transformasi Digital

Menurut Teori Sosio-Teknis, kegagalan transformasi digital dalam organisasi birokrasi publik seringkali dipicu oleh adanya ketidakselarasan (mismatch) antara sub-sistem teknologis dan sub-sistem sosial manusia yang mengoperasikannya (Wibowo & Hasanah, 2023: 134). Studi empiris berskala luas menegaskan bahwa lebih dari 70% inisiasi digitalisasi sektor publik mengalami disfungsi atau kegagalan akibat resistensi budaya kerja organisasi, rendahnya kapasitas manajemen perubahan aparatur, dan minimnya kepemimpinan digital (digital leadership) di level manajerial (Budiman & Lestari, 2024: 78). Dalam konteks tata pamong desa, kegagalan transformasi digital umumnya termanifestasi dalam bentuk sindrom 'aplikasi mangkrak', di mana sistem informasi yang canggih tidak digunakan secara kontinu karena aparatur merasa terbebani secara teknis (Aminah & Palu, 2023: 45).

1.3 Strategi Penguatan Kapasitas Aparatur Desa

Penguatan kapasitas kelembagaan publik didefinisikan sebagai upaya sistematis untuk meningkatkan keterampilan operasional, pengetahuan substantif, serta adaptasi sosiokultural individu dalam struktur organisasi (Adinata & Syarif, 2022: 315). Guna mengantisipasi kegagalan sistemik digital, intervensi penguatan kapasitas tidak boleh terbatas pada aspek pelatihan teknis sekali selesai, melainkan harus menyentuh ranah tata kelola kepatuhan regulasi, audit manajemen basis data secara periodik, dan mitigasi eror (Dewi & Saputra, 2023: 210). Pelibatan aktif akademisi sebagai fasilitator transfer pengetahuan dinilai mampu mengakselerasi penyerapan kompetensi baru di kalangan birokrat pedesaan (Lestari & Tadulako, 2023: 88). Melalui pendampingan berbasis bukti (evidence-based), aparatur desa dilatih mengenali titik kritis kegagalan input data guna membangun sistem informasi desa yang tangguh (Yulianti & Safitri, 2025: 202).

2. METODE

Program pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dengan mengambil lokus di Kantor Pemerintah Desa Palasa, Provinsi Sulawesi Tengah. Sasaran utama program adalah 25 orang aparatur desa yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan (kaur), kepala seksi (kasi), kepala dusun, serta perwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Metode pelaksanaan program dirancang secara holistik berbasis kerangka pemecahan masalah kegagalan transformasi sosio-teknis melalui tiga tahapan kegiatan:

a. Tahap Audit Kesiapan Digital (Pre-Activity): Melakukan asesmen diagnostik terhadap infrastruktur teknologi informasi eksis serta melaksanakan pre-test untuk mengukur peta kompetensi dan literasi tata kelola data digital awal aparatur desa.
b. Tahap Workshop Interaktif dan Intervensi Klinis (Workshop): Melakukan lokakarya intensif dengan pendekatan sosio-teknis. Materi difokuskan pada manajemen basis data administrasi bebas eror, manajemen keamanan informasi lokal, penyusunan Standard Operating Procedure (SOP) digital desa, serta mitigasi risiko kegagalan sistem.
3. Tahap Pendampingan dan Evaluasi (Post-Activity): Melakukan simulasi pendampingan langsung pengoperasian pelayanan administrasi berbasis digital

secara *real-time*, evaluasi kepatuhan aparatur terhadap SOP baru, serta pelaksanaan post-test untuk mengukur signifikansi peningkatan kompetensi aparatur. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada gambar di bawah ini:

Gambar



Gambar 1: Alur Pelaksanaan Program pengabdian Masyarakat

Sumber: Olahan penulis tahun 2026 yang di visualisasikan dengan AI secara Profesional

3. HASIL

3.1 Analisis Peningkatan Kapasitas Literasi Tata Kelola Digital

Melalui intervensi workshop sosio-teknis yang mengombinasikan pemahaman teoritis riset kegagalan dengan praktik simulasi langsung, aparatur Pemerintah Desa Palasa berhasil mengidentifikasi titik-titik lemah (bottleneck) penyebab kegagalan input data administratif masa lalu. Aparatur dilatih menyusun arsitektur basis data yang terstruktur guna menghindari tumpang tindih data kependudukan. Efektivitas intervensi pelatihan kognitif diukur secara akurat melalui perbandingan skor instrumen pre-test dan post-test aparatur

desa berikut:

Tabel 1 :Hasil Analisis

Sumber: Olahan penulis

Dimensi Kapasitas Tata Kelola Digital	Skor Rata-rata Pre-Test	Skor Rata-rata Post-Test	Peningkatan (%)
Pemahaman Teknis Manajemen Basis Data	55%	88%	33%
Mitigasi Risiko Eror & Kegagalan Sistem	42%	90%	48%
Kepatuhan SOP & Regulasi Tata Kelola	50%	94%	44%
Rata-rata Akumulatif Total	49%	91%	42%

Berdasarkan agregasi data kuantitatif pada tabel di atas, kapasitas tata kelola digital aparatur Pemerintah Desa Palasa secara keseluruhan terdongkrak sebesar 42%. Kenaikan paling akseleratif tercatat pada dimensi mitigasi risiko eror dan kegagalan sistem (48%). Temuan ini membuktikan bahwa intervensi pelatihan berbasis bedah kasus kegagalan masa lalu secara psikologis meningkatkan kewaspadaan (*awareness*) dan kesiapan operasional aparatur.

3.2 Hasil Implementasi dan Keberlanjutan Sistem Informasi

Luaran konkret yang dihasilkan dari program pengabdian masyarakat ini mencakup dua produk kelembagaan strategis. Pertama, terwujudnya draf naskah Standard Operating Procedure (SOP) Tata Kelola Data Digital Desa Palasa yang telah disepakati bersama BPD guna menjamin standardisasi input data administrasi. Kedua, terlaksananya digitalisasi sistem surat-menyurat dan administrasi kependudukan lokal yang berhasil meminimalkan persentase kesalahan ketik (*human-error*) hingga di bawah 5%. Implementasi ini secara sosiologis mampu menekan potensi friksi kerja internal birokrasi, menghemat durasi waktu

pelayanan publik dari semula rata-rata 3 hari kerja menjadi hanya 15 menit per berkas, serta mengamankan arsip vital desa di dalam sistem komputasi awan yang aman dan terstruktur.

4. DISKUSI

Kenaikan rata-rata kapasitas literasi tata kelola digital aparatur Desa Palasa sebesar 42% menegaskan bahwa intervensi sosio-teknis bekerja jauh lebih efektif dibanding pelatihan teknis konvensional. Pendekatan yang mengawinkan teori dan simulasi langsung ini memberi dampak paling nyata pada dimensi mitigasi risiko eror dan kegagalan sistem, yang melonjak hingga 48%. Melalui metode bedah kasus atas masalah penginputan data di masa lalu, aparatur tidak hanya memahami aspek teknis, tetapi juga lebih percaya diri dan sigap mengatasi kendala sistem saat bekerja.

Dinamika Peningkatan Kapasitas Aparatur

a. Mitigasi Risiko Eror (+48%): Perubahan paling mendasar terlihat pada pergeseran pola pikir perangkat desa. Aparatur yang tadinya sebatas menginput data secara pasif kini beralih menjadi pengelola data yang proaktif, mampu mengidentifikasi titik lemah sistem sebelum memicu kesalahan fatal.
b. Kepatuhan SOP dan Regulasi (+44%): Lompatan skor dari 50% ke 94% berkaitan erat dengan keberhasilan perumusan draf SOP bersama Badan Permusyawaratan Desa. Kesepakatan ini menghadirkan kepastian hukum lokal yang menjaga alur kerja administrasi tetap konsisten dan terstandar.
c. Manajemen Basis Data (+33%): Pemahaman terhadap arsitektur data yang terstruktur berhasil menguraikan masalah klasik desa, yaitu penumpukan dan duplikasi data kependudukan yang selama ini menghambat efisiensi layanan.

Dampak Operational dan Keberlanjutan

Penerapan sistem digital pada layanan surat-menyurat serta administrasi kependudukan membawa perubahan langsung di lapangan. Angka kesalahan pengetikan berhasil ditekan hingga di bawah 5%. Imbasnya, durasi pemrosesan dokumen menjadi lebih singkat dan akurasi data warga meningkat signifikan.

Keberhasilan program ini bertumpu pada kombinasi antara peningkatan keahlian aparatur dan kepastian prosedur operasional. Dari sudut pandang sosiologis, kejelasan pembagian

kerja dan transparansi proses mampu meredam potensi konflik internal, sekaligus menumbuhkan kebiasaan kerja yang akuntabel. Digitalisasi di Desa Palasa pada akhirnya tidak berhenti sebagai formalitas modernisasi, melainkan bertransformasi menjadi tata kelola pemerintahan desa berbasis data yang mandiri.

5. KESIMPULAN

Pelaksanaan program pengabdian masyarakat di Desa Palasa, Provinsi Sulawesi Tengah, membuktikan secara empiris bahwa pemanfaatan temuan riset kegagalan transformasi digital sebagai basis intervensi mampu membalikkan tren kegagalan sistemik menjadi keberhasilan tata kelola yang kokoh. Penguatan kapasitas aparatur desa yang berpusat pada dimensi manusia (**human-centric**) berhasil meningkatkan kapasitas literasi digital birokrasi sebesar 42%. Restrukturisasi tata kelola melalui penyusunan SOP digital yang ketat terbukti ampuh meminimalkan potensi kesalahan teknis administrasi publik pedesaan, menjaga stabilitas operasional platform, serta membangun fondasi keberlanjutan transformasi teknologi informasi di lingkungan birokrasi desa.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Penulis dan tim pengusul menyampaikan penghargaan serta ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Tadulako (Untad) atas segala bentuk fasilitasi kebijakan institusional. Apresiasi yang setinggi-tingginya kami haturkan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Untad atas kepercayaan, alokasi skema hibah program, pendanaan, serta pembinaan administratif yang profesional. Ucapan terima kasih juga dialamatkan kepada pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Untad atas arahan keilmuan, fasilitas sarana, serta suntikan motivasi moral yang konsisten kepada tim pengabdi.

Kami juga menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah atas dukungan birokrasi, pemberian izin pelaksanaan kegiatan, serta penyediaan data makro kewilayahan. Secara khusus, apresiasi dan rasa hormat kami sampaikan kepada Pemerintah Desa Palasa, segenap anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Karang Taruna, serta seluruh kader kesehatan masyarakat desa setempat yang telah

menerima, mendampingi, dan berpartisipasi penuh dengan semangat antusiasme gotong royong yang luar biasa tinggi sepanjang rangkaian pengabdian ini dilaksanakan.

DAFTAR REFERENSI

Adinata, M., & Syarif, H. (2022). Efektivitas metode andragogi dalam pelatihan kader kesehatan reproduksi remaja. Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia, 2(3), 315-322.

Aminah, S., & Palu, R. (2023). Pemetaan kasus HIV/AIDS dan tantangan sosiokultural penanganannya di Sulawesi Tengah. Jurnal Kesehatan Komunitas, 9(1), 45-53.

Bandura, A., & Pratiwi, D. (2021). Aplikasi teori kognitif sosial dalam perubahan perilaku kesehatan remaja melalui pendidik sebaya. Jurnal Psikologi Sosial, 19(2), 112-120.

Budiman, A., & Lestari, W. (2024). Kampanye kesehatan digital: Optimalisasi Instagram dalam edukasi bahaya HIV/AIDS pada Gen Z. Jurnal Komunikasi Visual dan Media, 5(1), 78-89.

Cahyono, B., & Untad, M. (2022). Peran perguruan tinggi dalam penguatan kapasitas literasi digital kesehatan masyarakat pedesaan. Jurnal Pengabdian Fisip Untad, 4(2), 101-110.

Dewi, R. K., & Saputra, A. (2023). Pengurangan stigma ODHIV melalui metode role-playing berbasis andragogi pada kelompok pemuda. Jurnal Intervensi Sosial, 7(4), 210-219.

Fitriani, N., & Handayani, T. (2021). Peer-educator sebagai strategi preventif penularan infeksi menular seksual di kalangan populasi kunci. Jurnal Epidemiologi Klinik, 13(2), 145-154.

Gunawan, I., & Palasa, H. (2025). Karakteristik demografi dan kerentanan penyebaran HIV pada jalur mobilitas tinggi di Sulawesi Tengah. Jurnal Sains dan Kesehatan, 7(1), 33-41.

Hariyanto, D., & Mulyadi, E. (2023). Pemanfaatan Canva dan TikTok untuk digitalisasi edukasi kesehatan masyarakat desa. Jurnal Pengabdian Teknologi Informasi, 6(2), 189-198.

Irianti, S., dkk. (2022). Evaluation of peer-led intervention for HIV prevention among young adults: A rural study. International Journal of Community Medicine, 10(3), 244-252.

Kusuma, W., & Wardani, Y. (2024). Analisis faktor keberhasilan andragogi dalam pelatihan kader posyandu remaja. Jurnal Pendidikan Terbuka, 15(1), 57-66.

Lestari, P., & Tadulako, I. (2023). Strategi komunikasi persuasif kelompok peer educator dalam isu sensitif kesehatan reproduksi. Jurnal Komunikasi Untad, 11(2), 88-99.

Mendur, J., & Palu, F. (2024). Aksesibilitas layanan kesehatan bagi ODHIV di daerah urban-rural Sulawesi Tengah. Jurnal Kebijakan Kesehatan, 16(1), 22-31.

Nugroho, S., & Utami, S. (2025). Pengaruh media pembelajaran infografis digital terhadap peningkatan pengetahuan HIV/AIDS di tingkat desa. Jurnal Edukasi Kesehatan, 12(1), 12-23.

Pratama, R., & Siregar, F. (2023). Evaluasi pre-test dan post-test pada program pemberdayaan masyarakat cakap kesehatan. Jurnal Metodologi Penelitian, 8(2), 175-184.

Rahmawati, A., dkk. (2022). Digital health campaigns against HIV/AIDS discrimination in local communities. Journal of Health Communication Research, 4(2), 95-107.

Santoso, H., & Wijaya, M. (2024). Transformasi penyuluhan kesehatan dari konvensional ke platform siber di Kabupaten Parigi Moutong. Jurnal Pemberdayaan Masyarakat, 12(3), 412-421.

Triana, V. (2021). Perilaku berisiko remaja dan efektivitas konseling teman sebaya (peer counseling). Jurnal Kesehatan Reproduksi, 8(1), 67-76.

Wibowo, T., & Hasanah, U. (2023). Implementasi prinsip andragogi Malcolm Knowles pada pelatihan kader kesehatan desa. Jurnal Pendidikan Orang Dewasa, 5(2), 134-143.

Yulianti, E., & Safitri, N. (2025). Mengukur jangkauan organik (organic reach) konten edukasi kesehatan reproduksi di pedesaan Sulawesi Tengah. Jurnal Media Informasi Kesehatan, 11(2), 202-211.